

**HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN TINGKAT
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
(S1) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



AGA NANDA EKO PUTRA

NIM 2015/15042026

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Judul : Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Padang tahun 2018**

Nama : Aga Nanda Eko Putra

NIM/TM : 15042026

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang, 13 Mei 2019

**Disetujui Oleh
Pembimbing**


Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial
Universitas Negeri Padang

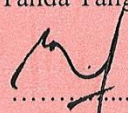
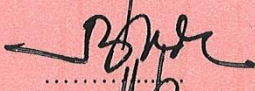
Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

Nama : Aga Nanda Eko Putra
NIM : 15042026
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu-ilmu Sosial

Padang 13 Mei 2019

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph. D	
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621 001 198903 1 002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aga Nanda Eko Putra

NIM/TM : 15042026/2015

Tempat/Tanggal Lahir : Mukomuko, 12 April 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul “ Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 ”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Mei 2019
Yang membuat pernyataan



Aga Nanda Eko Putra
NIM/TM. 15042026/2015

ABSTRAK

**AGA NANDA EKO PUTRA
15042026/2015**

**: Hubungan Status Sosial Ekonomi
dengan Tingkat Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota
Padang Tahun 2018**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberian suara pada pemilihan Walikota Padang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi hubungan antara status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Metode penelitian yang dilakukan merupakan metode kuantitatif korelasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *multi stage random sampling*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan hubungan status sosial ekonomi dimana tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018. Sedangkan masyarakat yang memiliki pekerjaan dalam pemilihan Walikota Padang tahun 2018 ternyata terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi politik. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Padang dengan hasil analisis uji ANOVA didapatkan nilai korelasi sebesar 0,255. Sedangkan tingkat pendidikan diperoleh nilai korelasi sebesar 0,609 , jenis pekerjaan dengan nilai korelasi sebesar 0,025 dan tingkat pendapatan diperoleh hasil korelasi sebesar 0,255.

Kata Kunci: Status sosial ekonomi, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan, Partisipasi politik.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018”. Shalawat berangkaikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Banyak bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dengan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya terutama penulis sampaikan kepada bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, dorongan dengan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam proses penyelesaian skripsi.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph. D selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku pembimbing akademik

4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku dosen penguji
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan dorongan selama perkuliahan
6. Kakak Sil dan kakak Puja selaku tata usaha Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan dan membantu administrasi hingga selesainya skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa sekali kepada keluarga penulis, kedua orang tua dan saudara, keluarga HIMA IAN FIS UNP, UK WP2SOSPOL, PRAMUKA UNP, KOMASBA AP UNP, IMKM UNP yang telah memberikan energi baru bagi penulis semangat untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb

Padang, 13 Mei 2019
Penulis

AGA NANDA EKO PUTRA
NIM. 15042026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	
1. Partisipasi Politik	
a. Pengertian Partisipasi Politik	15
b. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah	17
c. Partisipasi Politik dalam Pemilu	19
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat	22
2. Status Sosial Ekonomi	
a. Pengertian Status Sosial Ekonomi	25
b. Variabel dalam Status Sosial Ekonomi.....	28
c. Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	37
B. Kerangka Konseptual.....	40
C. Hipotesis Penelitian	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Operasionalisasi Variabel	44

D. Variabel Penelitian.....	47
E. Populasi dan Sampel.....	48
F. Jenis dan Sumber Data.....	52
G. Teknik Pengumpulan Data.....	54
H. Instrumen Penelitian	54
I. Uji Instrumen Penelitian	56
J. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	
1. Karakteristik Responden.....	70
C. Temuan Khusus	
1. Status Sosial Ekonomi	72
2. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilwako Padang 2018.....	75
D. Analisis Inferensial	
1. Uji Normalitas Data	82
2. Uji One Way ANOVA.....	83
E. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Politik Masyarakat.....	91
2. Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Partisipasi Politik Masyarakat.....	94
3. Hubungan Pendapatan dengan Partisipasi Politik Masyarakat.....	96
4. Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Politik Masyarakat.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	103
C. Keterbatasan Penelitian.....	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemberian Suara Pilkada Kota Padang 2008 sd 2018	5
Tabel 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	20
Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berdasarkan Kecamatan.....	49
Tabel 4. Wilayah Pengambilan Sampel pada tiga Kecamatan.....	51
Tabel 5. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	52
Tabel 6. Klasifikasi Skala Likert.....	55
Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	56
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Butir Instrumen	57
Tabel 9. Tingkat reliabilitas	59
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 11. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	66
Tabel 12. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	67
Tabel 13. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja	68
Tabel 14. PDRB Kota Padang.....	69
Tabel 15. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 16. Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	71
Tabel 17. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan	72
Tabel 18. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	73
Tabel 19. Jumlah Responden Berdasarkan Pendapatan.....	74
Tabel 20. Analisis Indikator Mengajak Orang Lain untuk Memilih.....	76
Tabel 21. Analisis Indikator Kegiatan Kampanye	77
Tabel 22. Analisis Indikator Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan	79

Tabel 23. Analisis Indikator Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik dan Administratif	80
Tabel 24. Hasil Uji Normalitas Data.....	82
Tabel 25. Hasil Uji Homogenitas Data Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Politik	83
Tabel 26. Hasil Uji ANOVA Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Politik	84
Tabel 27. Hasil Uji Homogenitas Data Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Partisipasi Politik.....	85
Tabel 28. Hasil Uji ANOVA Jenis Pekerjaan dengan Tingkat Partisipasi Politik	85
Tabel 29. Perbedaan Tingkat Partisipasi Politik Berdasarkan Jenis	86
Tabel 30. Hasil Uji Homogenitas Data Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi Politik	87
Tabel 31. Hasil Uji ANOVA Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Partisipasi Politik	88
Tabel 32. Hasil Uji Homogenitas Data Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Politik	89
Tabel 33. Hasil Uji ANOVA Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Politik	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 sd 2014 di Kota Padang	2
Gambar 2. Grafik Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Legislatif 2004 sd 2014 di Kota Padang	3
Gambar 3. Grafik Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2005 sd 2015 di Kota Padang	4
Gambar 4. Kerangka Konseptual	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin dan Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 2. Angket Penelitian
- Lampiran 3. Rekap Data Angket
- Lampiran 4. Data Uji Validitas dan Reabilitas
- Lampiran 5. Output Data dengan Bantuan *SPSS* Versi 21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) tidak terlepas dari demokrasi yang merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi, dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara demokratis, diselenggarakan melalui pemilihan secara langsung sebagai wujud kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Pemilihan umum terbagi atas Pemilihan legislatif (Pileg), Pemilihan presiden (Pilpres), dan Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemilihan umum tersebut dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.

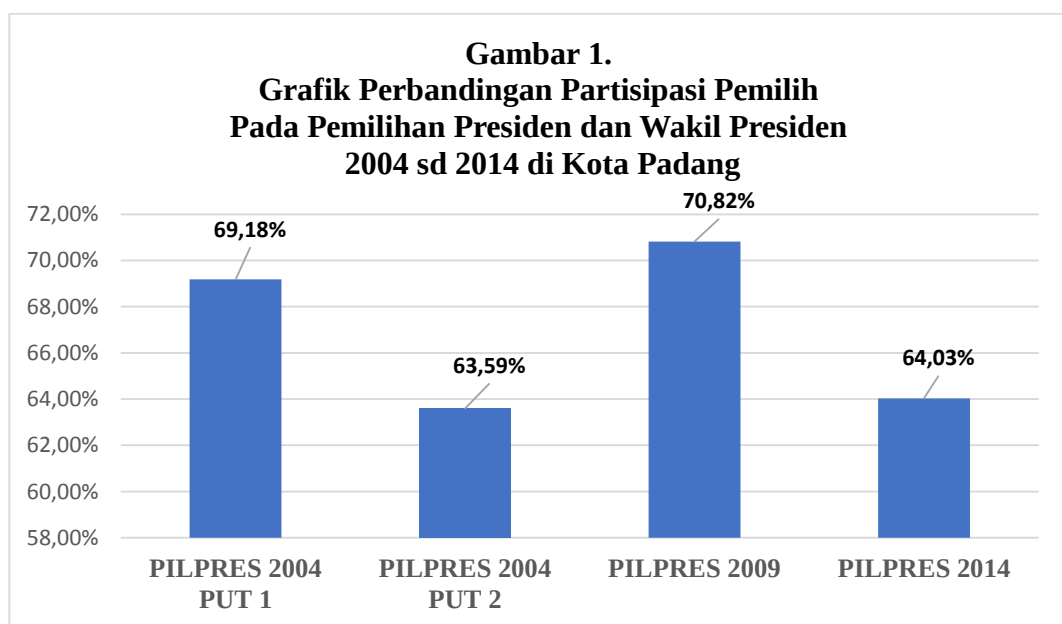
Dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, menuntut partisipasi masyarakat dalam memilih pasangan calon. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu termasuk kedalam partisipasi politik masyarakat. Partisipasi merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta

dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana Syafie, 2005:141).

Menurut Herbert Mc Closky (dalam Budiarjo, 2013:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

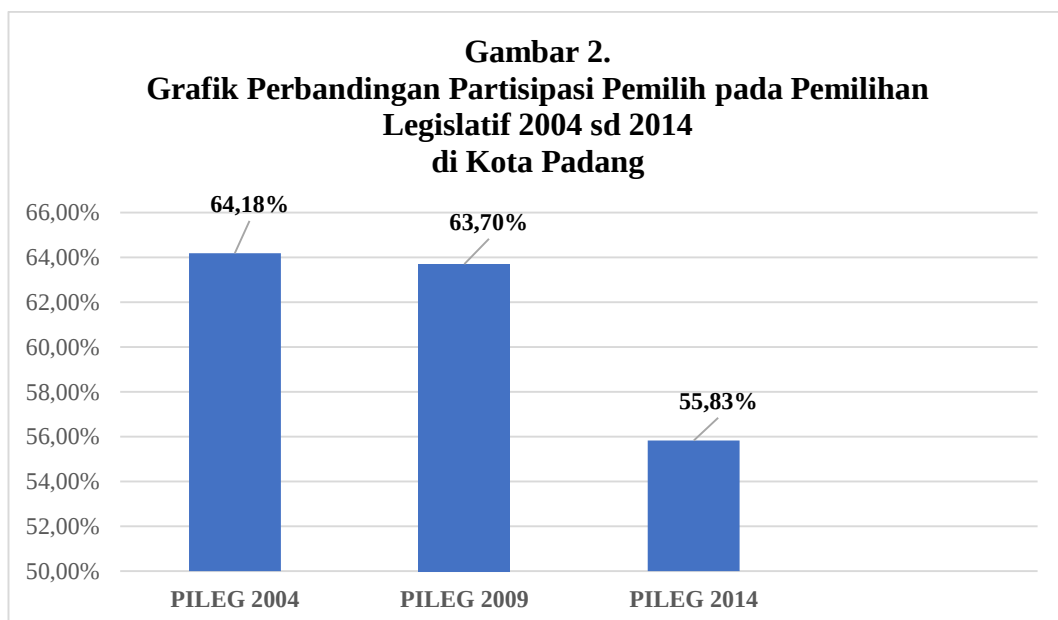
Dari pemaparan mengenai partisipasi politik tersebut, partisipasi politik masyarakat dapat kita lihat dalam pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Kota Padang, baik dalam Pemilihan presiden, Pemilihan legislatif, Pemilihan gubernur dan Pemilihan walikota yang mana menuntut keterlibatan masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap pasangan calon.

Berikut grafik tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam Pemilu:



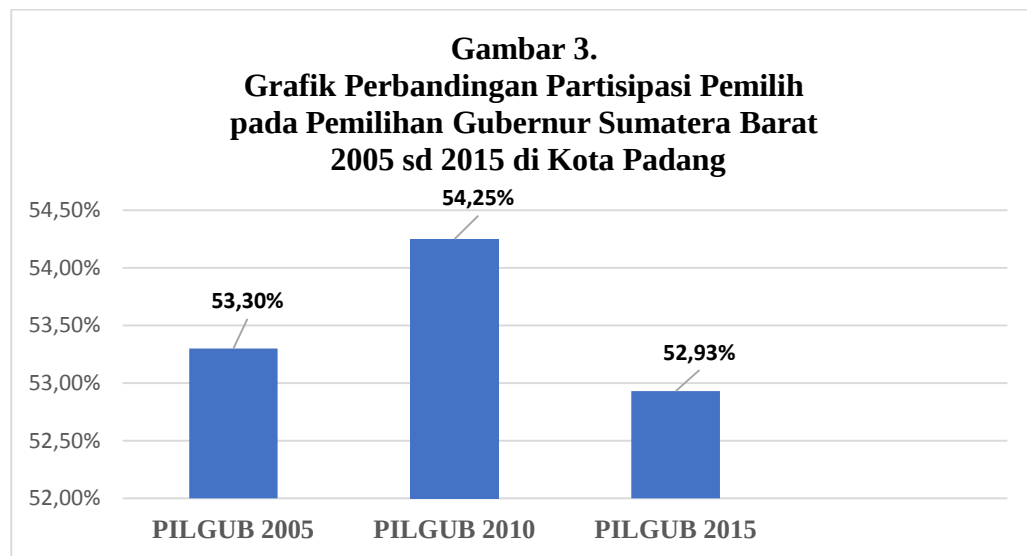
Sumber: KPU Kota Padang tahun 2018

Pada gambar 1, terjadi naik turunnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam pemilihan presiden setiap tahunnya. Partisipasi masyarakat tertinggi dicapai pada tahun 2009 dengan persentase 70,82%, sedangkan partisipasi terendah terjadi pada tahun 2004 putaran 2 dengan persentase 63,59%. Dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden rata-rata persentase masyarakat dalam memilih di Kota Padang sebesar 66,90%.



Sumber: KPU Kota Padang tahun 2018

Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Padang terlihat pada gambar diatas, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat setiap periode mengalami penurunan. Sedangkan penurunan secara drastis terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 55,83%. Adapun rata-rata persentase masyarakat Kota Padang dalam pemilihan Legislatif yaitu 61,24%.



Sumber: KPU Kota Padang tahun 2018

Pada gambar 3, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam pemilihan gubernur setiap periode mengalami kenaikan dan penurunan. Persentase dalam pemilihan tersebut tertinggi mencapai 54,25 % dan terendah 52,93 %, sedangkan rata-rata persentase masyarakat dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Padang sebesar 53,50 %.

Pada pemilhan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan gubernur di Kota Padang tersebut, telah memberikan gambaran bagaimana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam memberikan suara terhadap pasangan calon dalam pemilu. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang juga terjadi dalam pemberian suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang ini dilakukan dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung dengan memaknai memaknai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Dalam pemilihan tersebut diikuti oleh dua pasang calon yakni Emzalmi dan Desri Ayunda dengan nomor urut satu dan pasangan calon Mahyeldi dan Hendri Septa dengan nomor urut dua. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 535.265 jiwa, dengan rincian 273.468 jiwa untuk pemilih laki-laki dan 261.797 jiwa untuk pemilih perempuan yang tersebar dalam 104 kelurahan dan 11 Kecamatan (KPU Kota Padang, 2018).

Adapun persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemberian suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemberian Suara Pilkada Kota Padang tahun 2008 sd 2018

No.	Tahun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Menggunakan Hak Pilih	Persentase
1.	2008	541,473	309,486	57,16%
2.	2013 (Putaran 1)	561.189	323.594	57,66 %
3.	2014 (Putaran 2)	560.285	300.227	53,58%
4.	2018	535,265	341,281	63,76%

Sumber: KPU Kota Padang 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat partisipasi terendah masyarakat Kota Padang dalam pemberian suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terjadi pada tahun 2014 dalam putaran 2 sebesar 53,58 %. Sedangkan tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 63,76 %. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut tingkat partisipasi pemilih

mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, dan rata-rata persentase masyarakat Kota Padang dalam pemilihan tersebut menunjukkan partisipasi sebesar 58,04%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang dalam Pemilihan Walikota sangat rendah.

Berdasarkan pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif, dan pemilihan Gubernur serta pemilihan Walikota menunjukkan tingkat Partisipasi masyarakat di Kota Padang tidak mencapai angka 75%.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penanggungjawab dari pelaksanaan Pilkada, dalam hal ini tidak hanya berkewajiban dalam menyelenggarakan Pilkada tapi juga berkewajiban dalam meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan Pilkada. Salah satu indikatornya adalah partisipasi politik warga dalam menggunakan hak pilih. Merujuk pada RPJM, KPU secara nasional menetapkan angka partisipasi masyarakat sebesar 75% dalam Pemilihan umum (Pemilu).

Menurut *Economic Intelligence Unit* (EIU), sebuah lembaga yang bergiat dalam riset ekonomi dan politik berbasis di Inggris membuat tiga level partisipasi pemilih. Partisipasi level tinggi jika jumlah pemungutan suara antara 70 sampai 100 persen. Partisipasi moderat jika tingkat pemungutan suara antara 50 sampai 70 persen dan level rendah yaitu pemungutan suara antara 0 sampai 50 persen (dalam KPU RI, 2017:V). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum (Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilwako)

di Kota Padang yaitu di bawah 70 persen, sehingga menunjukkan bahwa Kota Padang tingkat partisipasi politik pemilih berada pada level moderat.

Dalam pemilu tersebut, rendahnya partisipasi politik pemilih, tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal dan berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Adapun meluasnya perubahan tersebut terhadap partisipasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Verba dan Nie (dalam Mujani, 2007:272-274) mengatakan bahwa sebagian besar partisipasi ditentukan oleh status sosial ekonomi. Dari beberapa temuan dan penelitian ini partisipasi pemilih dipengaruhi oleh status sosial individu. Status sosial ekonomi adalah adanya pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, dan pendidikan ekonomi (Santrock , 2007:282).

Status sosial ekonomi memiliki hubungan dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, menurut Wolfinger (dalam Efriza, 2012:543) alasan tersebut yakni pertama,tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Kedua, Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Ketiga, Pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berlatar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah.

Berdasarkan faktor sosial ekonomi tersebut, maka digambarkan status sosial ekonomi masyarakat Kota Padang, yakni pertama dari aspek pendidikan, berdasarkan data dari BPS Kota Padang (2018), jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2017 dengan jumlah 621.589 jiwa dari 927.168 yang menamatkan pendidikan, sehingga tingkat partisipasi dalam pendidikan penduduk Kota Padang mencapai 67,04 %. Tingkat Pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Padang terbanyak adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 215.033 jiwa. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditempuh yaitu dijenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 81.514 jiwa.

Kemudian dari aspek kedua, yakni pekerjaan berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS Kota Padang (2018). Total jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Padang tahun 2017 sebanyak 382.352 jiwa yang memiliki status pekerjaan utama dengan tingkat partisipasi yang dicapai yaitu sebanyak 41,23 % dari total keseluruhan penduduk Kota Padang dengan penduduk mencapai 927.168 jiwa, dimana status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai menjadi profesi yang paling banyak di tekuni oleh penduduk Kota Padang dengan jumlah 225.267 jiwa dan status pekerjaan utama yang paling sedikit yaitu pada profesi berusaha dibantu buruh tetap/buruh bayar sebanyak 11.814 jiwa.

Berikutnya yang ketiga dari aspek pendapatan, dari data Badan Pusat Statistik Kota Padang (2018), setiap tahunnya PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (miliar rupiah) setiap tahunnya mengalami kenaikan disetiap sektor lapangan usaha. Pada tahun 2015 sebesar 45 092,95, tahun 2016

sebesar 49 393,28, dan tahun 2017 sebesar 53 883,25. Adapun lapangan usaha dengan sumbangsih terbesar bersumber dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sedangkan yang terkecil bersumber dari pengadaan listrik dan gas.

Hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dijelaskan dalam temuan Conway (1985:19-24) pada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bagus umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. kemudian hal ini dipertegas dalam penelitian Muhammad Yahya Arwiyah (2012:85-92) yang menemukan bahwa ternyata status pendidikan, pendapatan, dan perbedaan jenis pekerjaan (nonpetani dibandingkan dengan petani) berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten Bandung dengan tingkat yang cukup. Maksudnya, masyarakat Kabupaten Bandung 2010 yang memiliki pendidikan dan pendapatan tinggi lebih berpartisipasi dalam pemilihan Bupati Bandung 2010 dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan dan pendapatan yang rendah (pendidikan rata- rata lulusan SMA), serta perbedaan jenis pekerjaan memiliki kecenderungan pekerjaan non petani lebih berpartisipasi dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bandung 2010 (banyaknya pemilih yang bekerja sebagai petani lebih sedikit daripada nonpetani).

Namun dalam beberapa penelitian lainnya, seperti, Marlini Tarigan (2009) dan Faizil Aziz (2012) tidak menemukan adanya hubungan positif antara status sosial

ekonomi dengan partisipasi politik. Artinya status sosial ekonomi tidak selalu memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Berangkat dari permasalahan di atas dan berdasarkan dari beberapa penelitian mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi politik, menjadi hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kota Padang dengan judul **“Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari tahun 2004 sd 2014 dengan rata-rata persentase yakni sebesar 66,90%.
2. Terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam Pemilihan Legislatif, yakni pada tahun 2004 persentase 64,1%, tahun 2009 dengan persentase 63,70% dan pada tahun 2014 terjadi penurunan yang drastis yaitu 55,83% dengan rata-rata persentase pada pemilihan ini sebesar 61,24%.
3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan rata-rata persentase dari tahun 2005 sd 2015 sebesar 53,50 %.

4. Rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang setiap periode, dengan rata-rata persentase sebesar 58,04%, sehingga dapat digambarkan dari tahun 2008 dengan persentase 57,16%, tahun 2013 Putaran 1 persentase 57,66%, putaran 2 tahun 2014 sebesar 53,58% dan pada tahun 2018 dengan persentase 63,76%.
5. Tidak tercapainya target tingkat partisipasi yang ditetapkan oleh KPU Pusat dengan tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang pada pemilu baik Pilpres, Pileg, Pilgub maupun Pilwako tidak mencapai angka 75%.
6. Banyaknya masyarakat Kota Padang yang tidak memiliki status pekerjaan utama, dimana lebih dari setengah jumlah penduduk Kota Padang tidak mempunyai status pekerjaan utama, yakni dengan persentase sebesar 58,77%.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah terdapat hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi politik pemilih dalam pemberian suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018”. Secara lebih rinci rumusan masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018?.
2. Apakah terdapat hubungan status pekerjaan masyarakat dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018?.

3. Apakah terdapat hubungan tingkat pendapatan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018?.
4. Apakah terdapat hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018?.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjelaskan signifikansi hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.
2. Menjelaskan signifikansi hubungan jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.
3. Menjelaskan signifikansi hubungan tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.
4. Menjelaskan signifikansi hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. **Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik serta memberikan informasi dan referensi, khususnya mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memperluas cakrawala berpikir penulis, serta dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai hubungan status sosial dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018.

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu lebih memberikan pemahaman dan sosialisasi politik secara merata disetiap lapisan masyarakat, baik yang berpendidikan, berpendapatan, memiliki jenis pekerjaan maupun sebaliknya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dimasa mendatang, sebagai saran dan masukan dalam mengambil kebijakan.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Menambah wawasan pengetahuan yang dapat di jadikan referensi sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik dalam

melakukan penelitian yang serupa mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum lainnya.